

Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama Oleh Uni Eropa dan IMF dalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

Diah Nur Fitrihani – 070810517

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

The financial crisis that occurred Greek in late 2009 led to financial shock in the countries of the European Union. This could also threaten the financial stability of the European Union as a whole. The help that European Union and IMF provided financial crisis management policy was the first bailout did not make the Greek financial stability recovered but worsen and the social situation was very chaotic. By using the theory and effectiveness bailout with neoliberal institutionalism perspective in seeing the European Union and the IMF as a lender of last resort, The failure of the first bailout by the European Union and IMF in overcome the Greek financial crisis was due to high financial interest European Union financial stability region than the Greek financial interests. This lead to lower effectiveness bailout in addresse the Greek financial crisis.

Keywords: Financial Crisis, Greece, European Union, IMF, bailout effectiveness, Eurozone, neoliberal institutionalism, regional financial stability

Krisis finansial yang terjadi pada Yunani di akhir tahun 2009 menyebabkan guncangan finansial pada negara-negara anggota Uni Eropa. Hal ini dapat mengancam kestabilan finansial kawasan Uni Eropa secara keseluruhan. Bantuan Uni Eropa dan IMF berupa kebijakan penanganan krisis finansial yaitu bailout pertama tidak membuat kestabilan finansial Yunani menjadi pulih tetapi semakin terpuruk dalam resesi ekonomi dan keadaan sosial yang sangat kacau. Dengan menggunakan teori dan efektifitas bailout dengan menggunakan perspektif institisionalisme neoliberal dalam melihat Uni Eropa dan IMF sebagai lender of last resort, kegagalan kebijakan bailout pertama oleh Uni Eropa dan IMF dalam mengatasi krisis finansial Yunani dikarenakan tingginya kepentingan finansial Uni Eropa menjaga stabilitas finansial kawasan daripada kepentingan finansial Yunani. Hal ini menyebabkan rendahnya efektivitas bailout dalam mengatasi krisis finansial Yunani.

Kata kunci: Krisis finansial, Yunani, Uni Eropa, IMF, efektifitas bailout, Zona Euro, institisionalisme neoliberal, stabilitas finansial kawasan

Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama oleh Uni Eropa dan Imf dalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

Krisis finansial Yunani yang diawali dengan menumpuknya utang, mengakibatkan guncangan pada nilai Euro. Keterkaitan antara finansial Yunani dengan Euro, tidak lain Euro adalah mata uang yang digunakan dalam kegiatan perekonomian Yunani. Euro merupakan mata uang tunggal dalam perdagangan kawasan zona Euro. Pada akhir tahun 2009, Deputi Menteri Keuangan Yunani Philippos Sahinidis akhirnya menyatakan bahwa utang negara telah mencapai 127,1% dari jumlah PDB-nya 300 miliar Euro. Ditandai dengan menggelembungnya utang-utang pemerintah yang sudah jatuh tempo dan bangkrutnya banyak bank-bank swasta maupun milik negara (<http://www.thetimes.co.uk/tto/business/economics/article2151423.ec> e 8 oktober 2014).

Dalam laporan keuangan negara yang semula defisit hanya 9,8% naik drastis empat kali lipat menjadi 15,4 %. Defisit Yunani sudah mencapai lebih dari 15% dari total PDB tahun 2009. Perdana Menteri Yunani yang pada saat itu dijabat oleh George Papandreou menyatakan bahwa utang Yunani masih dapat diatasi dan menjamin bahwa Yunani tidak jatuh bangkrut. Hal ini mengharuskan Yunani mengatasi krisis domestik ini sendiri tanpa bantuan Uni Eropa (<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8407605.stm> 20 oktober 2013). Pada awal Maret 2010 Perdana Menteri segera menjalankan program efisiensi pertamanya untuk mengumpulkan dana yang digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2010. Di bulan April, Yunani hanya mengumpulkan dana sebesar 5 miliar Euro dari kebijakan tersebut dan akhirnya meminta bantuan dana pada Uni Eropa sebesar 45 miliar Euro menghindari gagal bayar (*default*) dan membiayai defisit anggarannya (<http://www.bbc.com/news/business-13856580> 20 oktober 2013).

Pada awal Mei 2010 kebijakan *bailout* pertama Yunani dengan nilai mencapai 110 miliar Euro disepakati dengan kontribusi Uni Eropa sebesar 80 miliar Euro dan sisanya 30 miliar Euro dari Organisasi Moneter Internasional (IMF). Bantuan dana yang diberikan oleh Uni Eropa dan IMF berupa pinjaman dengan bunga sebesar 5% melalui program Stand by Arrangement (SBA) yang harus mulai dibayar pada tahun 2013. Syarat yang diajukan Uni Eropa dan IMF dalam *bailout* yaitu adanya disiplin fiskal (*austerity*) dan perubahan struktural pada Yunani. Syarat tersebut disepakati antara Uni Eropa, IMF dan Yunani dalam Economic Adjustment Programme (IMF,2013). Setelah selama satu tahun perekonomian tidak juga membaik malah semakin

Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama Oleh Uni Eropa dan IMF dalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

memburuk ditambah dengan maraknya demonstrasi massal, meningkatnya kekerasan dan meledaknya pengangguran. Menteri Keuangan Yunani Evangelos Venizelos berpendapat bahwa negaranya telah dipermalukan dan mendapatkan reputasi buruk oleh dunia Internasional akibat dari ketidakmampuan Uni Eropa dalam mengatasi krisis di Yunani (<http://www.bbc.co.uk/news/business-14969034> 1 November 2013).

Pada pertemuan G20 di Paris bulan Oktober 2011, kekhawatiran Uni Eropa timbul kembali pada kemampuan Yunani untuk membayar utang. Hal ini membuat Uni Eropa kembali memberikan pinjaman pada Yunani, tetapi perjanjian ini juga mendapat penentangan dari Inggris, yang menolak beberapa syarat yang tertulis dalam perjanjian tersebut (<http://www.bbc.com/news/business-15319026> 1 November 2013). Uni Eropa juga melakukan pemotongan nilai utang Yunani sebesar 50% dan penambahan kapasitas dana *bailout* sebesar 130 miliar Euro ([www.tempo.co/read/news/2012/02/21/090385346/Uni-Eropa-Setuju i-Bailout-Kedua-Yunani](http://www.tempo.co/read/news/2012/02/21/090385346/Uni-Eropa-Setuju-i-Bailout-Kedua-Yunani) 1 November 2013). Perdana Menteri George Papandreou menolak perjanjian tersebut dan ingin menggelar referendum kepada warga Yunani untuk mempertanyakan apakah Yunani tetap dalam zona Euro atau keluar (<http://www.bbc.com/news/business-13856580> 20 Oktober 2013). Hal ini mendapatkan reaksi keras dari parlemen Yunani dan Uni Eropa yang berupaya untuk membantu Yunani.

Menteri Keuangan Evangelos Venizelos meredam kecemasan Uni Eropa dengan pernyataannya bahwa keanggotaan Yunani terlalu berharga untuk ditaruhkan di meja voting dan mosi tersebut akhirnya dibatalkan, tetapi hal ini membuat Perdana Menteri George Papandreou dipaksa turun oleh partai oposisi dan bahkan oleh partainya sendiri. Pada tanggal 9 November 2011, Perdana Menteri George Papandreou akhirnya resmi mengundurkan diri dari pemerintahan dan meminta parlemen agar segera membentuk pemerintahan baru. Lucas Papademos mantan kepala bank Yunani mengambil kepemimpinan kabinet sebagai utusan dari partai koalisi New Democracy/Pasok untuk mengisi tampuk pemerintahan yang telah ditinggalkan oleh George Papandreou (<http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8879647/George-Papandreou-resigns-as-Greeces-prime-minister.html> 5 November 2013). Kepemimpinan sementara pemerintahan Yunani dipegang oleh Perdana Menteri Papademos yang akhirnya melakukan persetujuan atas kebijakan *bailout* yang kedua pada tanggal 14 Maret 2012. Perdana Menteri Jean Claude Juncker dari Luxembourg yang menduduki kepemimpinan dalam Komisi Uni Eropa mengatakan bahwa Yunani telah setuju menerima *bailout* yang kedua

dari Uni Eropa dan IMF dan berkomitmen untuk mengatasi ini (Castle 2012).

Dengan disetujuinya *bailout* yang kedua maka gugurlah kesepakatan *bailout* yang pertama. Kekhawatiran Uni Eropa atas ketidakmampuan Yunani memenuhi target yang diberikan Uni Eropa dan IMF menjadikan kesepakatan *bailout* pertama Yunani telah gagal. Pada akhir 2013 pimpinan IMF yang baru Christine Lagarde menyatakan bahwa kebijakan *bailout* pertama merupakan kesalahan dan kegagalan dalam mengatasi krisis yang dialami Yunani pada saat itu. Hal ini menimbulkan efek domestik yang sangat signifikan dan kerugian pada masyarakat Yunani sendiri (<http://www.theguardian.com> 15 oktober 2013)

Kerangka Pemikiran

Menurut Holsti, sesuai dengan fungsinya *bailout* yang merupakan bantuan pinjaman dana yang diberikan untuk mengatasi krisis finansial jika negara meminta bantuan pada negara lain atau institusi yang berwenang seperti IMF (Perwita & Yani 2005, p.83-84). Dalam mencari solusi yang tepat untuk merespon krisis finansial, Yunani memakai dua alternatif, pertama dimana negara cenderung menggunakan utang jangka pendek untuk membiayai pembangunan jangka panjang yang memicu kepanikan investor dan Alternatif kedua menjelaskan pinjaman dalam bentuk asuransi yang bisa mendorong kebijakan yang rapuh pada negara debitur. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan meningkatkan biaya penanganan krisis agar tidak terjerumus kedalam masalah krisis yang membuat kreditur berspekulasi karena panik(Roubini & Setser 2004, p. 77-78). Kepanikan yang dirasakan kreditur domestik atau asing akan memunculkan *moral hazard* dan *bank runs*. Peran *lender of last resort* dalam memberikan bantuan memiliki kerangka kerja yang dapat dijamin keberhasilannya (Roubini & Setser 2004, p. 85-87). Menurut Edison adanya finansial internasional yang terintergrasi (IFI), krisis finansial suatu negara dapat juga meningkatkan spekulasi *contagion* (Edison, Levine, & Sløk 2002, p. 3).

Kehadiran yang *lender of last resort* menjamin tersedianya likuiditas untuk menghentikan larinya uang mencegah ekuilibrium yang buruk. *Bailout* dapat berjalan jika krisis merupakan kombinasi dari likuiditas dan secara fundamental lemah tetapi tidak pada ekonomi makro yang lemah (Roubini & Setser 2004, p.110). Dalam analisis perhitungan *bailout* yang dilakukan Jun Il Kim, *bailout* dalam skala besar dan termasuk dalam pengecualian tidak efektif dalam penyelesaian krisis jika negara debitur memiliki fundamental ekonomi yang relatif lemah

Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama Oleh Uni Eropa dan IMF dalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

dan tingkat utangnya tinggi. Jika menggunakan akses pengecualian, *bailout* mungkin berjalan jika kelayakan instrumen dibatasi hanya pada negara dengan memiliki fundamental ekonomi yang relatif kuat dan utang yang *sustainable* (Kim 2007). Menurut Roubini keberhasilan pemberian *bailout*, dapat diukur dari kemampuan negara dalam memperbaiki kebijakan fiskalnya dan kemampuan menjalankan kebijakan penyesuaian struktural menggunakan indikator kenaikan ekonomi makro domestik secara keseluruhan (Roubini & Setser 2004, p.50-65).

Kooperasi *bailout* antara Uni Eropa dan IMF merupakan dampak dari negosiasi kepentingan G7. Yunani menerima *bailout* dengan jumlah yang besar merupakan dukungan multilateral antara Uni Eropa dan IMF dan tidak ada konflik distribusi, walaupun adanya heterogenitas substansial dalam piutang G5 pada Yunani. menurut Doyle *bailout* IMF merupakan wujud dari kepentingan pemilik saham yang tidak lain adalah G5 walaupun staff dan teknokrat IMF banyak yang tidak setuju dalam penanganan krisis utang pemerintah Eropa (Breen 2013, p.120-122). Barnett and Finnemore menelaah hubungan antara *interest* dan *preferences* negara dapat mempengaruhi institusi/organisasi internasional. Kleine menerjemahkan perilaku institusi/organisasi internasional, yang tercermin dalam pada norma informal dan “rule of the game” sebagai pembentuk struktur dan menuntun perilaku institusi/organisasi dalam dunia politik (Breen 2013, p.13). Robert Keohane menyebut tindakan negara yang dipengaruhi oleh kelembagaan institusi dengan institusionalisme neoliberal (Kusumawardhana 2013, p.5). Stein berpendapat bahwa dengan adanya institusi yang semakin berkembang akan membentuk pemerintahan supranasional dan memperbesar peran institusi dalam politik internasional. Semakin kompleksnya masalah dan tantangan yang dihadapi negara menjadikan peran dan fungsi institusi semakin berkembang yang menghasilkan pemerintahan multilevel dimana negara menjadi nakhodanya (Stein, 215-217). Perkembangan pada institusi terlihat jelas dengan bergabungnya IMF dan Uni Eropa dalam menangani krisis finansial Yunani.

Dalam pandangan institusionalisme neoliberal, institusi/organisasi internasional menekankan pada pentingnya peran negara dan kepentingan nasional mereka dalam mempengaruhi kebijakan institusi/organisasi internasional. institusi/organisasi internasional merupakan *intergovernmental actor* yang berkooperasi untuk berbagi *national interest*. Prinsip intergovementalisme adalah pengambilan keputusan merupakan hasil konsensus dan bergantung pada *power* negara yang merupakan fungsi dari birokrasi dalam institusi/organisasi internasional (Breen 2013, p.161). Pollack menambahkan bahwa

gambaran yang cocok untuk proses pengambilan kebijakan dalam Uni Eropa adalah model perundingan intergovermental. Kepentingan negara-negara anggota tetap tersalurkan tetapi kepentingan bersama yang sesuai dengan fungsi Uni Eropa menentukan arah kebijakan (Pollack 2010, p. 20). Kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa berkembang dalam kerangka kerja untuk meningkatkan kooperasi dari Perjanjian Maastrict yang mengikat integrasi dari negara-negara anggota sampai pengaturan implementasi kebijakan yang tertulis dalam Perjanjian Lisbon. Dalam perkembangannya European Commission berperan lebih effisien dan mempunyai agenda yang ambisius dalam efektifitas dana bantuan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan (Carbone 2013,p.230). Stabilitas finansial Uni Eropa tercantum dalam Stability Growth Pact yang diatur oleh European Community dan European Central Bank. Uni Eropa sejak awal dibentuk berdasarkan landasan ekonomi maka stabilitas finansial kawasan menjadi salah satu pilar utama institusi (http://ec.Europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm 19 November 2014). Kebijakan *bailout* pertama Yunani menjadi tidak efektif dalam menangani finansial Yunani karena tingginya kepentingan stabilitas kawasan Uni Eropa.

Perundingan Dalam Penentuan Kebijakan Bailout Pertama Yunani

Euro merupakan mata uang kawasan yang tidak dicetak oleh negara-negara yang menggunakan Euro itu sendiri atau bank sentral dimasing-masing negara. Euro dicetak oleh Bank Sentral Eropa (ECB) dan merupakan tugas ECB untuk mengatur kebijakan moneter (Ardagna & Caselli,2012). Keputusan untuk memberikan kucuran dana untuk Yunani tidak hanya diputuskan oleh ECB sebagai lembaga berwenang dalam mengeluarkan kebijakan moneter tetapi juga Uni Eropa yang disebut European Community (EC) yang memberikan kebijakan apa yang dibuat untuk merespon kesulitan finansial yang dialami Yunani (Bastasin 2012,p. 191).

Kebijakan EC haruslah mendapat persetujuan dari semua anggotanya, tidak terkecuali Perancis dan Jerman sebagai penyumbang besar perekonomian Uni Eropa. Suara Jerman dan Perancis memiliki *power* yang kuat dalam kelangsungan pasar regional dalam Uni Eropa(Thompson 2013,p. 3-7). Piutang Jerman, Perancis dan Inggris

Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama Oleh Uni Eropa dan IMF dalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

dalam negara *periphery* terlalu banyak hingga dapat mengancam kestabilan utang Uni Eropa. Kestabilan utang Eropa yang sebagian besar berasal dari uang pajak penduduknya mengalami banyak kerugian jika Yunani sampai terjadi gagal bayar (Thompson 2013,p. 3-7). Perancis sebagai kreditur terbesar dalam tumpukan utang Yunani juga memiliki resiko yang besar terhadap perbankannya jika sampai utang tersebut melayang begitu saja. Perancis membujuk Yunani untuk meminta bantuan pada IMF yang terkenal sebagai *lender of last resort* untuk ikut memberikan Yunani kucuran dana agar perekonomiannya kembali bergerak dan dapat membayar utangnya (Ardagna & Caselli,2012).

Kebijakan *bailout* Uni Eropa dan ECB yang diberikan pada Yunani menurut IMF harus segera dilakukan mengingat tumbuhnya spekulasi jika Yunani mengalami gagal bayar diiringi oleh keluarnya Yunani sebagai anggota Uni Eropa (Ardagna & Caselli,2012). Peran ECB sebagai pengatur sistem moneter Uni Eropa yang tercantum dalam Articles 13 Treaty of European Union, dipertaruhkan dalam hal ini jika sampai guncangan atas keluarnya Yunani dapat menurunkan nilai Euro lebih jauh lagi (Lelieveldt, H. & Princen,p.55). Tetapi hambatan bagi Uni Eropa untuk memutuskan memberikan bantuan finansial terdapat dalam ketentuan dalam Articles 125 Treaty of Functioning of European Union yang berisikan Uni Eropa tidak diperbolehkan memberikan bantuan finansial secara langsung kepada sesama negara anggota dan ECB tidak dapat berperan sebagai *lender of last resort* (Witte 2011,p.1-2). Hal ini membuat Uni Eropa mencari solusi lain untuk tetap memberikan *bailout* pada Yunani dengan berlandaskan Articles 122(2) Treaty of Functioning of European Union, walaupun artikel tersebut menyiratkan bahwa pemberian bantuan finansial hanya untuk bencana atau kejadian luar biasa yang diluar kendali (Witte 2011,p.1-2).

Kebijakan *bailout* pertama untuk Yunani menggabungkan antara Uni Eropa dengan IMF dalam penyediaan dana yang tidak biasa dibandingkan kemampuan negara untuk mengembalikan. Hal ini dikarenakan besarnya tekanan kepentingan Uni Eropa dalam krisis Yunani dimana negara anggota Uni Eropa memiliki suara 32% dalam pengambilan keputusan IMF. Ditambah dengan kedekatan Dirut IMF dengan pemimpin negara anggota Uni Eropa, yang menjadikan IMF dilibatkan dalam kebijakan *bailout* untuk Yunani. Setelah Uni Eropa kesulitan dalam memberikan dana bantuan bagi Yunani yang menyalahi perjanjian, maka Uni Eropa memerlukan kerjasama dengan IMF. Walaupun perjanjian itu akhirnya dirubah menjadi lebih fleksibel dan menetapkan lembaga yang menyediakan dana stabilitas (EFSF) setelah kesepakatan pemberian *bailout* pertama Yunani (Seitz & Jost 2012,p. 5).

Dalam hal ini, keterlibatan IMF tampaknya merupakan upaya Uni Eropa untuk menghindari larangan pembiayaan langsung dari defisit anggaran pemerintah melalui bank sentral. Tekanan yang utama datang dari Presiden Perancis Nicholas Sarcozy yang mendesak Strauss Kahn untuk ikut mengambil bagian dalam penanganan kebijakan ini. Tekanan politik dapat merusak independensi IMF sebagai agen dalam manajemen krisis dan lembaga finansial internasional (Seitz & Jost 2012,p. 6-8). *Bailout* yang diberikan pada Yunani cukup besar, walaupun jumlah dana tidak lebih dari 30% dari total utang Yunani. Total pemberian dana *bailout* sebesar 30 miliar Euro melebihi ketentuan kuota kontribusi Yunani pada IMF dan ketentuan besarnya dana pinjaman dari IMF (IMF,2013). Penurunan standart yang diberikan IMF kepada Yunani dilakukan karena dikhawatirkan krisis finansial yunani menimbulkan *spillover effect* pada negara zona Euro dan mengganggu kestabilan nilai Euro, maka program tersebut mendapatkan akses pengecualian. (IMF,2013).

Dalam isi Economic Adjustment Programme (EAP) mengandung sebagian besar program pengetatan anggaran pemerintah yang memberikan kontribusi besar terjadinya krisis. EAP berisikan beberapa perubahan mendasar pada sektor fiskal, finansial dan struktural yang mendukung konsep disiplin fiskal. Pengurangan defisit anggaran pemerintah Yunani dengan memperketat pengelolaan fiskal dan penyesuaian pada *balance of payment* (European Commission,2010). Pengetatan fiskal adalah cara yang lebih bijaksana untuk meningkatkan performa fiskal, dalam hal ini dari pada bergantung pada pendapatan fiskal, dan berkomitmen untuk mengurangi defisit anggaran. Langkah-langkah yang sulit di terapkan dan diimplementasikan didepan, sedangkan langkah-langkah yang mengarah pada administratif diproyeksikan pada tahap berikutnya. Kebijakan tersebut meliputi program penyesuaian ekonomi makro, kenaikan pajak, perubahan dana buruh dan pensiun (European Commission,2010).

Ekonomi Makro Yunani Setelah Implementasi Bailout Pertama

Patokan pengaruh *bailout* terhadap pemulihan krisis finansial Yunani berhasil atau gagal dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi makro Yunani. Defisit Yunani yang berlebihan pada akhir tahun 2009 menjadi target utama untuk Yunani dapat mengembalikan roda ekonominya. Pengurangan terbesar pada komsumsi pemerintah sebesar 1,4% dan pengurangan import sekitar 10% untuk mengurangi beban defisit pada akhir tahun 2010. Pada tabel 1 tahun 2009 Yunani mengalami perubahan dari negara perekonomian yang sedang tumbuh menjadi

Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama Oleh Uni Eropa dan IMF dalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

negara yang rapuh. IMF dan Uni Eropa berupaya memperbaiki perekonomian Yunani melalui perubahan fiskal yang stabil pada angka 3% pada tahun 2014. Pada akhir tahun 2010 defisit fiskal dipangkas hingga 7% tidak memenuhi target sebanyak 8%. Pendapatan pada pemerintah menunjukkan angka positif dengan terus mendekati target yang diharapkan. Hal ini tidak sebanding dengan pengeluaran pemerintah terpotong hanya 2% dari yang seharusnya 4,5%, tetapi semakin bertambah kembali pada tahun 2011 dan 2012 yang membuat Yunani sulit untuk memangkas pengeluaran pemerintah yang dari awal sudah membengkak.

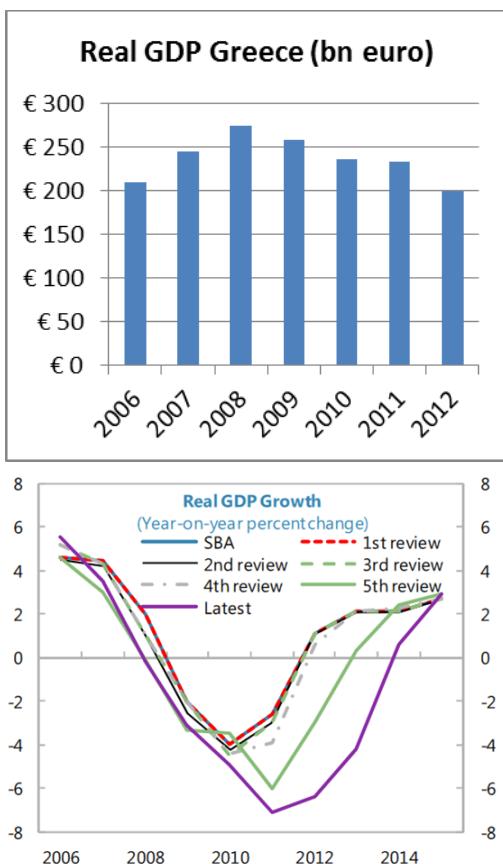
Tabel 1. Data Ekonomi Makro Yunani Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan Internasional

Selected Indicator	Type	2006	2007	2008	2009	2010		2011		Fiscal Year
						EAP	Real	EAP	Real	
Real GDP growth	% annual change	5,5	3,5	-0,2	-2,4	-4	-4,9	-2,6	-7,1	2010/11
Domestic demand	% annual change	5,7	5	1,1	-2,3	-7,7	-7	-6	-8,7	2010/11
Private consumption expenditure	% annual change	5,3	3,3	2,3	-1,8	-3,8	-6,2	-4,5	-7,7	2010/11
Gov. consumption expenditure	% annual change	-0,1	8,4	0,6	9,6	-8,2	-8,7	-8	-5,2	2010/11
Trade balance	% of GDP	-7,8	-7,3	-6,8	-4,7	-6	2010/11
Exports of goods and services	% of GDP	23	24	24	19	20,5	22	26,1	25	2010/11
Imports of good and services	% of GDP	35	38	39	31	21,7	32	15,1	33	2010/11
General gov. balance	% of GDP	-13,6	-8	-10,8	-7,6	-9,6	2010/11
Interest payment	% of GDP	5	5,6	6,1	6,6	6,8	2010/11
Primary gov. balance	% of GDP	-10,5	-2,4	-4,9	-1	-2,4	2010/11
Total expenditure goverment	% of GDP	42,9	45,2	48	52,1	47,6	50,2	50,2	52,6	2010/11
Total gov revenue	% of GDP	38	39,51	39,2	36,81	39,62	39,1	42,6	41,1	2010/11
Gov. deficit	% of GDP	-5,7	-6,5	-9,8	-15,6	-8,02	-10,7	-7,63	-9,5	2010/11
General gov. debt	% of GDP	106,1	107,4	112,9	129,7	133,2	148,3	145	170,3	2010/11
Unemployment rate	% annual change	8,7	7,9	9	9,5	11,9	11,2	14,8	15,3	2010/11
Implicit/lending interest rate	% of GDP	...	4,59	4,7	5,1	4,5	6,1	4,77	6,8	2010/11
HICP average	% annual change	3,3	3	4,2	1,2	1,9	4,7	-0,4	3,3	2010/11
Current account (BoP)	% of GDP	-11,3	-14,6	-14,9	-13,1	-10,8	-10,3	-8,4	9,9	2010/11

Sumber: IMF, World Bank, Eurostat dan OECD yang diolah

Semenjak disiplin fiskal diimplementasikan PBD riil Yunani semakin menurun bukannya semakin bertambah tetapi semakin berkurang (Mankiw 2006, p.15). Sebagaimana ditunjukkan grafik PDB riil Yunani yang semula mencapai lebih dari 250 miliar Euro pada 2009 menjadi 200 miliar Euro pada tahun 2012 (lihat grafik 1). Hal ini menyebabkan pertumbuhan PDB Yunani menjadi mundur hingga 7% dalam kurun waktu 3 tahun. Konsumsi masyarakat juga menurun dibandingkan konsumsi pemerintah dengan selisih 5% pada akhir 2012 yang menandakan kemampuan masyarakat untuk membeli berkurang. Perekonomian Yunani mengalami banyak penurunan dan kekhawatiran mendalamnya krisis semakin terasa.

Grafik 1. PBD Riil (miliar Euro) dan Pertumbuhan PDB Riil (%) Yunani



Sumber: IMF

Sumber: worldbank yang diolah

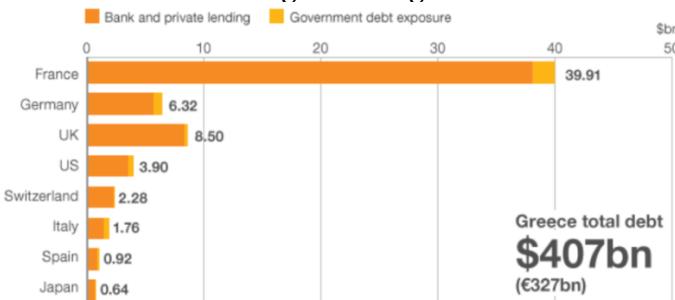
Inflasi yang tinggi juga mempengaruhi produksi barang dan jasa menjadi turun karena harganya tidak bisa bersaing dengan produk negara-negara Uni Eropa lainnya, sehingga menyebabkan bisnis dalam negeri banyak yang gulung tikar. Inflasi juga menyebabkan naiknya suku bunga bank rata-rata 6% yang berdampak pada tingginya angka kredit macet. Selain itu dampak inflasi yang tinggi juga diiring dengan naiknya angka pengangguran (Janssen 2010., p. 7-11). Pengangguran Yunani meningkat hingga 20% dikarenakan perubahan pada struktural melalui EAP, upah buruh Yunani menjadi turun dan tidak terserapnya tenaga kerja muda karena penambahan waktu untuk pensiun yang diperpanjang (Lapavitsas & Kulterbrunner dkk. 2010, p.39-40).

Utang yang harus dibayar Yunani pada tanggal 18 Mei 2010 mencapai 8,5 miliar Euro belum lagi ditambah bunga yang harus dibayarkan pada tahun 2011 dan 2012 yang mencapai 25 miliar Euro. Dengan utang yang

Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama Oleh Uni Eropa dan IMF dalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

begitu besar, dana *bailout* yang diberikan tidak cukup untuk menggerakkan perekonomian (Karagiannis & Kondeas 2012, p. 54-60). Sedangkan pendapatan Yunani sangat menurun diakibatkan oleh semakin sedikitnya pajak yang diterima pada saat roda perekonomian tidak bergerak semakin sulit dihadapi oleh Yunani. Privatisasi yang kurang serius ditangani juga tidak memberikan kontribusi yang banyak pada penyelesaian beberapa utang. Bagi Yunani mengumpulkan dana sebanyak 13% dari total PDB untuk membayar utang adalah hal yang mustahil dengan defisit tidak kunjung stabil (Manolopoulos 2011,p. 28-36). Pada Grafik 2 jumlah utang luar negeri Yunani yang terbanyak ada di Perancis, berikutnya Inggris dan Jerman. Dengan tingkat utang yang tinggi yang berpengaruh pada peringkat kredit pemerintah Yunani, ketiga lembaga kredit menurunkan peringkat kredit Yunani menjadi yang paling buruk dan mengakibatkan Yunani mengalami keringnya investasi pada sektor finansial Yunani (Manolopoulos 2011,p. 28-36).

Grafik 2. Jumlah Utang Luar Negeri Yunani Juli 2012

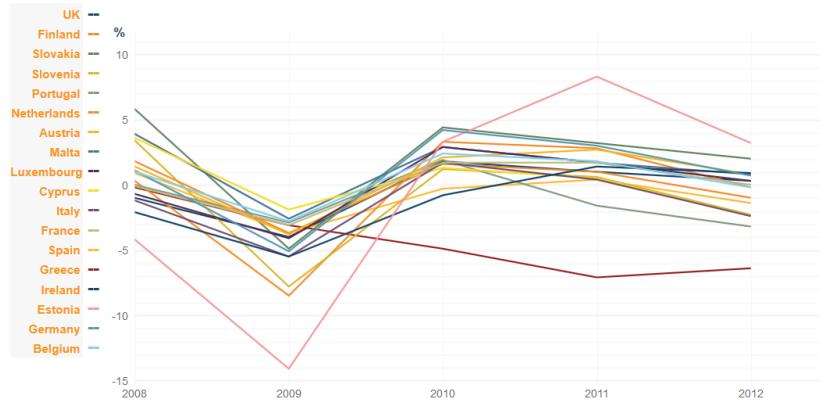


Sumber:BBC News

Finansial Kawasan Uni Eropa Pada Masa Implementasi Bailout Pertama Yunani

Kestabilan kawasan yang menjadi tujuan utama Uni Eropa dalam menerapkan EMU. Sistem moneter ini terintegrasi dengan anggota Uni Eropa yang berbeda tingkat pertumbuhan ekonominya. Sistem ini gagal jika antar anggota tidak mampu menjaga kestabilan perekonomian domestiknya. Indikator utama pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah ekonomi makronya. Ekonomi makro Uni Eropa terlihat pada grafik 3 tidak mengalami goncangan yang berarti pada masa krisis finansial Yunani berlangsung sejak 2009 hingga berakhirnya *bailout* pertama tahun 2012 .

Grafik 3. Pertumbuhan PDB Negara Uni Eropa (Perubahan dari tahun sebelumnya persen dari total PDB)

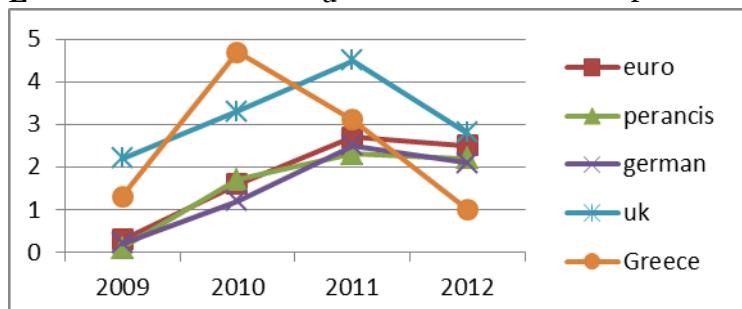


Sumber: Eurostat dalam BBC News

Pertumbuhan PDB Uni Eropa berada diantara angka -2 hingga 5% dari tahun 2010 hingga 2012 yang menunjukkan masih berada dalam zona aman. Pertumbuhan PDB pada 28 anggota Uni Eropa rata-rata 2% pada tahun 2010 sampai 1,6% pada tahun 2011. Sedangkan pertumbuhan rata-rata PDB 18 negara yang memakai Euro sebesar 1,9 pada tahun 2010 dan 1,6 pada tahun 2011. Walaupun mengalami penurunan 0,2% tetapi masih dalam taraf yang aman karena tidak mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan krisis finansial Yunani yang mulai bertambah parah pada tahun 2011. Irlandia dan Portugal yang sempat menerima dana *bailout* juga telah memperlihatkan perubahan positif dengan berada pada angka pertumbuhan 1-2%. Dengan tidak mengalami penurunan yang signifikan, Uni Eropa berhasil mempertahankan pertumbuhan 2% pada 2010 dan 1,6% pada 2011.

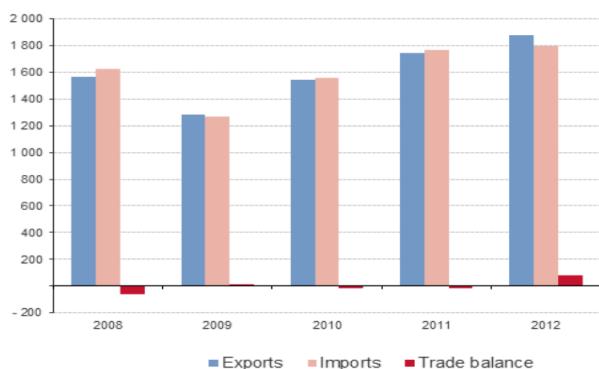
Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama Oleh Uni Eropa dan IMF dalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

Grafik 4. Tingkat Inflasi Yunani, Inggris, Jerman, Perancis dan Zona Euro



Sumber: worldbank

Grafik 5. Perdangan Barang/Jasa Uni Eropa Tahun 2008-2012

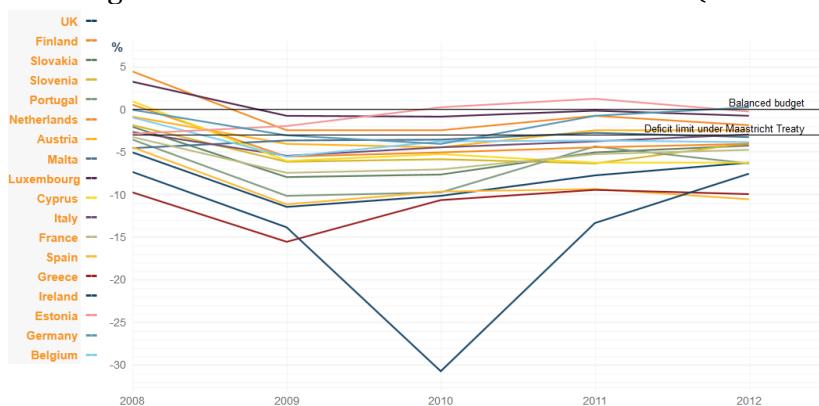


Sumber: Eurostat

Krisis finansial Yunani juga memberikan dampak pada kenaikan inflasi sebesar 2,5% pada kawasan zona Euro. Inflasi yang tinggi juga terjadi pada Inggris sebesar 4,5 % yang hampir menyamai Yunani yang sedang dilanda krisis. Inggris yang menjadi negara ketiga dengan prosentase utang Yunani terbanyak ikut terkena imbas dari krisis Yunani dan Irlandia. Inflasi dipastikan naik pada saat terjadi krisis tetapi tingkat kenaikan inflasi pada zona Euro dapat dikendalikan pada angka 2,5% begitu juga Jerman dan Perancis. Kestabilan juga ditunjukkan oleh perdagangan eksport dan impor anggota Uni Eropa pada tahun 2010 sampai 2011, walaupun pada tahun 2012 mengalami penurunan 10% dari total PDB. Perdagangan Uni Eropa tetap lancar walaupun Yunani sedang mengalami resesi. Perekonomian Yunani yang menyumbang

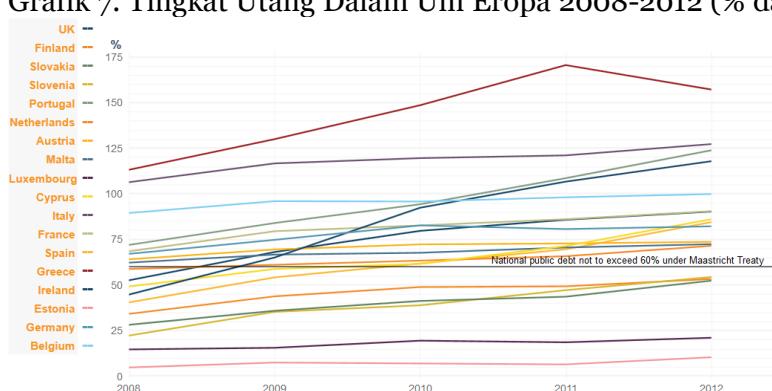
sebagian kecil dari pertumbuhan Uni Eropa membuat negara-negara anggota lainnya sepertinya tidak terpengaruh.

Grafik 6. Tingkat Defisit Dalam Zona Euro 2008-2012 (% dari total PDB)



Sumber: Eurostat

Grafik 7. Tingkat Utang Dalam Uni Eropa 2008-2012 (% dari total PDB)



Sumber: Eurostat

Perkembangan defisit pada neraca anggaran pemerintah negara anggota Uni Eropa berada dibatas 5% . Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan ambang batas Perjanjian Maastrict yaitu 3%, tetapi Uni Eropa berhasil mengendalikan defisit anggotanya yang tidak terkena krisis agar defisitnya tidak bertambah selama 2010-2012, selain Yunani, dan Irlandia. Begitu pula dengan tingkat utang dalam Uni Eropa tidak mengalami kenaikan berlebih, hanya Yunani yang mengalami. Angka pengangguran di kawasan zona Euro sempat naik 2% antara tahun 2008 sampai 2009 dikarena gelombang krisis global. Tingginya angka pengangguran di Yunani akibat disiplin fiskal tidak serta merta membuat angka pengangguran dalam zona Euro bertambah. Pergerakan ekonomi yang mendapat berita positif tentang *bailout* dapat menekan gejolak pasar dan mengamankan buruh dari kehilangan pekerjaannya.

Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama Oleh Uni Eropa dan IMF dalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

Pengangguran mulai meningkat jumlahnya setelah kabar *bailout* kedua diterima Yunani.

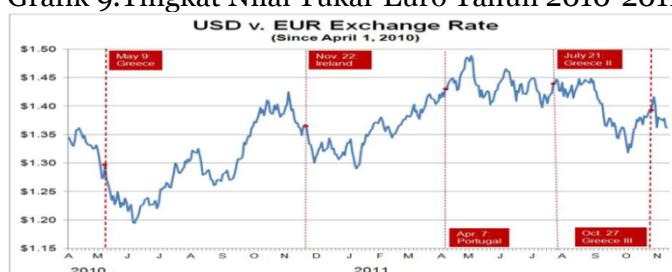
Grafik 8. Tingkat Pengangguran Di Kawasan Zona Euro Tahun 2009-2012



Sumber: Trading economics

Kestabilan nilai Euro menjadi pilar utama stabilitas finansial zona Euro yang berada dalam kesatuan ekonomi dan moneter (http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm)³ November 2013). Nilai Euro mengalami penurunan sejak diumumkan bahwa Yunani mendapatkan *bailout* dari Uni Eropa, walau sebelumnya indikasi penurunan itu sudah terlihat sejak akhir 2009. Nilai Euro mulai merangkak naik setelah kepastian jalannya pemberian *bailout* mulai diberikan oleh Uni Eropa untuk Yunani dan program penerapan disiplin fiskal oleh Yunani sebagai bentuk kepastian Uni Eropa dalam menjaga kestabilan Euro. Hal ini mengakibatkan iklim perdagangan stok saham dan Euro bergerak stabil dengan nilai tukar antara 1,35 sampai 1,4 dollar per Euro hingga akhir 2011.

Grafik 9.Tingkat Nilai Tukar Euro Tahun 2010-2011



Sumber: Bloomberg

Nilai Euro yang mengalami penurunan terhadap dolar pada bulan April sampai Juni 2010 menandakan bahwa para pelaku pasar melakukan spekulasi ketersediaan Uni Eropa dalam memberikan *bailout* pada Yunani atau tidak. Peringkat kredit (*Credit Rating*) juga menentukan status negara-negara Uni Eropa untuk memberikan pandangan bagi

investor untuk mengalirkan dana dalam negara tersebut. Pada tabel 3 terlihat bahwa sebagian besar obligasi negara-negara Uni Eropa memiliki peringkat A yang berarti memiliki resiko penundaan pembayaran yang rendah. Negara yang memiliki resiko tinggi adalah Irlandia dan Portugal, dimana kedua negara tersebut sempat mengalami krisis finansial setelah Yunani. Tetapi Irlandia dan Portugal masih berada dalam tingkat resiko moderat setelah mendapatkan kepastian *bailout* dari Uni Eropa dan IMF setelah *bailout* pertama Yunani. Negara *core* dalam Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, dan Belanda masih tetap dalam peringkat aman. Hal ini mempunyai arti bahwa sebagian besar negara-negara Uni Eropa tidak mengalami pengaruh signifikan dalam tingkat peringkat kredit pada masa *bailout* pertama diimplementasikan Yunani.

Tabel 3. Peringkat Utang Jangka Panjang Milik Pemerintah Negara-Negara Kawasan Uni Eropa Per 1 Desember 2011

Negara Uni Eropa	Lembaga Peringkat		
	Moody's	Standard & Poor's	Fitch
Austria	Aaa	AAA	AAA
Belgia	Aa1	AA+	AA+
Ciprus	Baa1	BBB+	BBB
Estonia	A1	AA-	A-
Finlandia	Aaa	AAA	AAA
Perancis	Aaa	AAA	AAA
Jerman	Aaa	AAA	AAA
Yunani	Ca	CC	CCC
Irlandia	Ba1	BBB+	BBB+
Italia	A2	A	A+
Luxemburg	Aaaa	AAA	AAA
Malta	A2	A	A+
Belanda	Aaa	AAA	AAA
Portugal	Ba2	BBB-	BBB-
Slovakia	A1	A+	A+
Slovenia	Aa3	AA	AA-
Spanyol	Aa2	AA-	AA-
Inggris	Aaa	AAA	AAA

Keterangan: Aaa/AAA:resiko minim, Aa/AA:resiko sangat rendah,A:resiko rendah,B,Baa/BBB:resiko moderat,Ba/BB:resiko substasial,B:resiko tinggi,Caa/CCC:resiko sangat tinggi

Sumber: Mirror News, 1 Desember 2011

Analisis Kepentingan Stabilitas Finansial Kawasan Uni Eropa Pada Bailout Pertama Yunani

Kestabilan finansial kawasan merupakan kepentingan yang utama bagi Uni Eropa. Perbandingan yang terjadi begitu mencolok antara Yunani dengan negara-negara lain dikawasan Uni Eropa, tidak terkecuali negara yang juga mengalami krisis finansial dengan kedekatan waktu yang tidak jauh. Pertumbuhan ekonomi makro yang menjadi tonggak kestabilan negara terintegrasi dalam European Monetary Sistem (EMS) untuk melihat kestabilan kawasannya. Stabilitas finansial negara dapat dilihat dari ekonomi makro negara tersebut, antara lain terdiri dari tingkat pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, tingkat utang, tingkat defisit dan jumlah pengangguran. Ekonomi makro Yunani yang sebelumnya sudah menurun, setelah implementasi *bailout* pertama tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan tetapi malah memburuk. Sedangkan ekonomi makro negara-negara kawasan Uni Eropa cenderung stabil.

Dari hasil analisa pada ekonomi makro Uni Eropa dan grafik naik turunnya nilai Euro terhadap dollar dapat diketahui bahwa pasar mulai percaya bahwa Yunani menepati janjinya untuk membayar utang dan tidak terjadi gagal bayar, walaupun ekonomi makro Yunani tidak menunjukkan perbaikan (Ardagna, S.& Caselli, F.,2012, p. 8-10). Hal ini menyebabkan para negara pemegang obligasi Yunani yang sebagian besar dimiliki oleh bank-bank yang juga menjadi pendonor dalam paket *bailout* pertama merasa aman karena adanya jaminan pembayaran utang. *Bailout* yang diberikan juga mencegah terjadinya klaim massal atas obligasi Yunani yang berdampak pada turunnya nilai Euro. Prioritas pembayaran utang pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kredit macet yang terjadi pada bank-bank diluar Yunani yang memegang obligasi pemerintah Yunani. Kelancaran pembayaran berpengaruh positif pada neraca berjalan milik negara-negara yang memiliki dimana bank negara tersebut memegang obligasi pemerintah Yunani seperti Perancis, Jerman dan Inggris.

Presiden ECB Jean Claude Trichet menyatakan khawatir jika Yunani mengalami gagal bayar dampaknya tidak bisa diperhitungkan pada pasar dan negara lain. Efek *contagion* menimpa Uni Eropa mulai terasa ketika Irlandia, dan Portugal juga meminta *bailout* pada Uni Eropa pada waktu yang berdekatan (Mink & Haan 2012,p.11). Efek *contagion* dapat tercegah dengan melihat stabilitas ekonomi makro sebagian besar negara-negara Uni Eropa setelah pemberian *bailout* pertama Yunani. Kebijakan *bailout* juga memunculkan kekhawatiran Uni Eropa lainnya yaitu *moral hazard*. Dilandasi dengan latar belakang Yunani yang pandai menyembunyikan kesalahannya hingga akhirnya terungkap, langkah Uni Eropa untuk mencegah terjadinya *moral hazard* pada *bailout* adalah dengan membentuk Troika. Troika dapat menekan

terjadinya *moral hazard* yang menumpangi kepentingan *bailout* sesungguhnya karena keterlibatan tiga lembaga besar yang mengawasi pemberian dan penggunaan dana (IMF,2013). Perekonomian Yunani yang menurun juga berpotensi terjadinya *bank runs* pada bank-bank kawasan Uni Eropa jika tidak mendapatkan *bailout* dari Uni Eropa. Menurut Roubini, *bank runs* merupakan ulah dari para spekulan yang tidak percaya bahwa negara dapat menyelesaikan krisis tanpa adanya *lender of last resort* (Roubini & Setser 2004,p.26).

Bailout tidak didapatkan secara gratis oleh Yunani tetapi bersyaratkan disiplin fiskal. *Austerity* (disiplin fiskal) yang diberikan pada Yunani oleh Uni Eropa dan IMF dicanangkan dalam program EAP. Uni Eropa beranggapan bahwa ekonomi makro Yunani sudah melebihi batas ketentuan institusi, yang tercantum dalam Stability Growth Pact, yang harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi dalam zona Euro.Tetapi menurut IMF *bailout* yang diberikan pada Yunani merupakan dukungan Uni Eropa pada Yunani sebagai dari kawasan Euro dengan menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan *austerity* (IMF,2013). Uni Eropa berkeyakinan bahwa dengan disiplin fiskal, kepercayaan pada kredibilitas utang Yunani tumbuh seiring dengan kepastian pemerintah Yunani dalam menjalankan disiplin fiskal dari Uni Eropa. Utang Yunani yang tidak stabil dan defisit yang berlebihan mempengaruhi tingkat kepercayaan kredibilitas Yunani dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Disiplin fiskal dilakukan untuk mengembalikan fundamental ekonomi Yunani yang sudah kelewatan batas. Kebijakan fiskal yang merupakan tugas negara anggota Uni Eropa untuk menjaga perekonomiannya, karena kebijakan moneter ada dibawah kewenangan Bank Sentral Eropa. Dalam krisis Yunani yang merupakan tipikal krisis utang pemerintah, dibutuhkan dana yang cukup untuk dapat melunasi utang yang menumpuk yaitu dengan menambah kas negara lewat penghematan (European Commission,2010).

Reaksi yang paling terlihat pada saat Yunani terkena krisis finansial adalah perubahan status predikat kredit pemerintah Yunani yang turun dratis. Status predikat kredit yang pada awal 2009 menempati status AA- diberikan oleh Standart & Poor's yang berarti masih memiliki potensi sebagai kredit yang lancar berganti menjadi CCC yang artinya sangat buruk dan kemungkinan tidak bisa membayar ketika Yunani menerima *bailout* dari Uni Eropa (Martin & Waller, 2012). Peringkat kredit Yunani yang cepat berubah dapat menyebabkan investor beraksi spekulatif dan dapat mempengaruhi predikat kredit negara kawasan Uni Eropa. Status kredit dan obligasi negara-negara Uni Eropa masih bertahan dengan status terbaiknya yaitu AAA dari spekulasi masyarakat

Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama Oleh Uni Eropa dan IMF dalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

atas ketidakpedulian Uni Eropa pada krisis yang terjadi pada Yunani. Terutama peringkat kredit Jerman dan Perancis yang tidak terpengaruh penurunan peringkat beberapa seperti Irlandia dan Portugal (lihat tabel 3). Pada era globalisasi ini reaksi masyarakat tersebut tercermin dalam lembaga-lembaga analisis keuangan, seperti Standart & Poor's, Moody's, dan Fitch yang merupakan lembaga yang paling berpengaruh didunia (De Santis, 2012).

Dari semua bukti keuntungan yang didapat Uni Eropa melalui kebijakan *bailout* yang paling tidak ternilai harganya adalah kepentingan dalam menjaga keutuhan Uni Eropa. Keberlanjutan integrasi Uni Eropa berhasil diselamatkan melalui *bailout* pertama ini dengan harga pengorbanan rakyat Yunani. Kebijakan *bailout* tidak saja untuk Yunani, tetapi bermanfaat untuk menjaga stabilitas kawasan dan kelangsungan integrasi Uni Eropa sebagai institusi. Kebijakan *bailout* pertama Yunani juga menjadi pertanda bahwa negara lain yang juga mengalami masalah finansial di negara periphery seperti Irlandia dan Portugal mendapat kepastian bantuan dari Uni Eropa. Kebijakan *bailout* dikeluarkan sebagai pencegahan terpecah-belahnya keutuhan Uni Eropa atas isu keluarnya Yunani jika mengalami gagal bayar. Hal tersebut yang membuat negara-negara khawatir mengalami hal yang sama jika Yunani tidak terlebih dahulu mendapatkan *bailout* dari Uni Eropa dan IMF (Sulistyo, 2012). *Bailout* tetap diberikan karena tingginya kepentingan Uni Eropa untuk menjaga stabilitas finansial kawasannya, walaupun dengan resiko terjadinya resesi ekonomi pada Yunani. Stabilitas finansial kawasan yang terjaga akan menjaga keberlanjutan integrasi Uni Eropa, ketika spekulasi keluarnya Yunani berhemus kencang. Walaupun harus Yunani harus mengalami dampak buruk dari disiplin fiskal yang ketat untuk mendapatkan dana bantuan, hal ini dilakukan Uni Eropa untuk mengembalikan kepercayaan dunia atas kemampuan Uni Eropa sebagai institusi besar.

Kesimpulan

Kegagalan *bailout* pertama Yunani sudah terlihat dari perundingan yang didominasi oleh negara *core* dalam Uni Eropa dan ukuran *bailout* yang terlalu besar untuk Yunani. Bukti gagal juga terlihat dari data-data ekonomi makro Yunani setelah mengimplementasikan kebijakan tersebut menunjukkan angka penurunan dan tidak memenuhi program EAP. Dilain sisi pada masa implementasi kebijakan *bailout* pertama oleh Yunani, ekonomi makro, nilai Euro, dan peringkat kredit negara-negara kawasan Uni Eropa menunjukan tingkat yang stabil. Tingkat pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, utang, defisit dan pengangguran di negara-negara anggota Uni Eropa lebih stabil dari pada Yunani. Hal

tersebut membuktikan bahwa *bailout* pertama Yunani efektif dalam menjaga stabilitas finansial Uni Eropa.

Rendahnya efektifitas *bailout* pertama dalam mengatasi krisis finansial Yunani terjawab dalam perpektif institusionalisme neoliberal yang digunakan Uni Eropa dan IMF dalam *bailout* pertama Yunani. Kepentingan-kepentingan Uni Eropa dalam *bailout* pertama tidak sepenuhnya ditujukan untuk memperbaiki finansial Yunani tetapi lebih pada menjaga stabilitas ekonomi makro kawasan Uni Eropa, prioritas pembayaran utang, pencegahan penularan krisis di kawasan Uni Eropa, menjaga stabilitas Euro, menjaga stabilitas investasi untuk negara Uni Eropa yang lain melalui peringkat kredit dan mencegah perpecahan didalam Uni Eropa. Tingginya kepentingan Uni Eropa dalam *bailout* pertama, membuat Yunani sebagai negara yang meminta pertolongan dari Uni Eropa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Keadaan Yunani yang sudah terlanjur memburuk mengakibatkan kebijakan tersebut harus dihentikan dan sebagai gantinya Uni Eropa memberikan kebijakan *bailout* kedua yang lebih mengutamakan kepentingan Yunani dari pada Uni Eropa.

Daftar Pustaka

Buku:

- Bastasin, C.,2012, *Saving Europe: How National Politics Nearly Destroy the Euro*,Brookings Institute Press., Washington D.C.
- Binhadi & Firmansyah,2007,*Stabilitas Keuangan Internasional* dalam buku *IMF dan Stabilitas Keuangan Internasional*, Gramedia, Jakarta
- Breen, M.,2013,*The Politics of IMF Lending*, Palgrave Macmillan, England
- Lelieveldt, H. & Princen, S.,*The Politics of The European Union*. Cambridge University Press.,USA
- Manolopoulos, J.,2011, *Greece Odious Debt*,Anthem press, New York, [book online] diakses tanggal 16 November 2014 tersedia dalam: www.book.google.co.id
- Mankiw, G.,2006,*The Macroeconomist As Scientist And Engineer*, National Bureau Of Economic Reech, Cambrige,
- Perwita, A.A.B., & Yani, Y.M.,2005,*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rodakarya, Bandung
- Pollack, M.,2010,*Policy-making in the European Union*,Oxford University Press

Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama Oleh Uni Eropa dan IMF dalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

Roubini and Setser, 2004, *Bailouts or Bail-ins: Responding to Financial Crises in Emerging Economies*. Automated Graphic Systems Inc: Washington DC,

Jurnal dan Laporan:

Ardagna, S.& Caselli, F.,2012,*The Political Economy of the Greek Debt Crisis: A Tale Of Two Bailout*,[journal online] diakses tanggal 3 Oktober 2013, tersedia dalam: <http://econpapers.repec.org/RePEC:cep:cepsps:25>

Bappenas,2011,*Krisis Keuangan Eropa*,[online],diakses tanggal 10 oktober 2013, tersedia di: www.bappenas.go.id

Claessens,S.&Kose,A.,2013,*Financial Crises: Explanations, Types, and Implications*, IMF Working Paper

Carbone,2013,*Preserving Policy Autonomy: EU Development Cooperation rom Maastrict to Lisbon*,dalam buku The EU's Lisbon Treaty: Institutional Choices and Implementation, Ashgate Pubs., hal 230,[book online] diakses tanggal 18 Des 2014, tersedia dalam: <https://books.google.co.id>

Davies, M., & Ng T.,2011,*The Rise of Sovereign Credit Risk: Implications for Financial Stability*,BIS Quarterly Review,diakses 9 Desember 2014, tersedia dalam: www.bis.org

De Santis, R.A.,2012, *The Euro Area Sovereign Debt Crisis: Safe Heaven, Credit Rating Agencies And The Spread Of The Fever From Greece, Ireland And Portugal*, Working Paper Series NO 1419,[online] diakses tanggal 4 Desember 2014 tersedia dalam:<http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1419.pdf>

Edison, H.J., Levine. R., Ricci, L., & Sløk, T. 2002. *International financial integration and Economic Growth*, National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 9164. [online]www.nber.org/papers/w9164

European Commision,*Economic and Financial Affairs: Stability And Growth Pact*,diakses tanggal 19 November 2014, tersedia dalam: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm

European Commission,The Euro,[online],diakses tanggal 3 November 2013, tersedia dalam:http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm

European Commission,2010,*Occasional Papers 61:The Economic Adjustment Programme for Greece*, Directorate-Generalfor Economic and Financial Affairs Pub.,Brussels

European Commission,2010,*Occasional Papers 68:The Economic Adjustment Programme for Greece*, Directorate-Generalfor Economic and Financial Affairs Pub.,Brussels

- European Commision,*Economic and Financial Affairs: Stability And Growth Pact*,diakses tanggal 19 November 2014, tersedia dalam:<http://ec.Europa.eu>
- European Union,2013,*The EU's response to the crisis*,[online] diakses tanggal 17 September 2014, tersedia dalam: www.Eurozone.Europa.eu
- European Commission,2011,*Occasional Papers 94:The Economic Adjustment Programme for Greece*, Directorate-Generalfor Economic and Financial Affairs Pub.,Brussels
- European Commission,2013,*New rules on credit rating agencies (CRAs) enter into force – frequently asked questions*,[online] diakses tanggal 4 Desember 2014 tersedia dalam: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-571_en.htm
- IMF,2010,*Europe and IMF Agree €110 Billion Financing Plan With Greece*,[online] diakses tanggal 15 oktober 2013, tersedia dalam:<http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/caro5021oa.htm>
- IMF,2013,*Greece:Ex Post Evaluation Of Exceptional Access Under The 2010 Stand-By Arrangement*, [online],diakses tanggal 20 oktober 2013, tersedia di: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdf>
- Janssen, R.,2010, *Greece and the IMF:Who Exactly is Being Saved?*, Center of Economic and Policy Research, WASHington D.C. [online] diakses tanggal 15 November 2014, tersedia dalam www.cepr.net
- Lapavitsas,C.& Kultenbrunner A. dkk., 2010, *Eurozone Crisis: Beggar Thy Self And Thy Neighbour*,Journal of Balkan and NearEastern Studies, 12 (4)
- Karagiannis, N.&Kondeas, A., 2012, *The Greek Financial Crisis and A Developmental path To Recovery: Lesson and Option* dalam Real Wolrd Economy Review Issue no. 60,
- Kim, J.,2007, *Unconditional IMF Financial Support and Investor Moral Hazard*, IMF working paper
- Kusumawardhana, I.,2013, *European Union in Crisis :Menguatnya Pandangan Berbasis Kedaulatan di dalam Krisis Ekonomi Uni Eropa*, Jurnal Hubungan Internasional:Volume VI , No. 1
- Martin dan Waller, 2012,*A Brief Explanation of How the Greek Sovereign Debt Crisis Came to Be*, [online] diakses tanggal 10 oktober 2013, tersedia di: <http://www.reed.edu/economics/parker/f12/341/Sim/rpts/Greece.pdf>
- Mink, M. & Haan, J.,2012,*Contagion during the Greek Sovereign Debt Crisis*,DNB Working Paper No. 335, Amrsterdam, [online]diakses tanggal 20 November 2014, tersedia dalam:www.researchgate.net

Kegagalan Kebijakan Bailout Pertama Oleh Uni Eropa dan IMF dalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012

- Seitz, F.& Jost, T., 2012, *Discussion paper no.32: The Role Of The IMF in the European*[online] diakses tanggal 15 oktober 2014, tersedia dalam:www.oth-aw.de
- Stein, A.,*Chapter 11: Neoliberalism Institutionalism*,Hal 215-217,[online] diakses tanggal 3 Nov 2014 tersedia dalam:www.grandstrategy.net/Publications/Articles/.../11-Smit-Snidal-c11.pdf
- Sulistyo, D.,2012,*Krisis Yunani: Pelajaran Buat Regionalisme ASEAN*,Unair,[online] diakses 20 Oktober 2014 tersedia dalam:<http://djoko-s-d-fisip.web.unair.ac.id>
- Thompson, H.,2013,*The Crisis Of The Euro: The Problem Of German Power Revisited*, SPERI Paper No.8
- Witte, B.,2011,*The European Treaty Amendment for the Creation of a Financial Stability Mechanism* dalam *European Policy Analysis*,Sieps Press.,Swedia[online], diakses tanggal 20 November 2014, tersedia dalam:<http://cadmus.eui.eu>

Berita Online:

- _____,2012, *Krisis Zone Euro Goncang Ekonomi Global*,Kompas[online]diakses tgl 29 Okt 2014, tersedia dalam:www.nasional.kompas.com
- BBC,2011, *EU summit 'will be decisive' on Eurozone crisis*,BBC NEWS,[online] diakses tanggal 1 November 2013 tersedia di:<http://www.bbc.com/news/business-15319026>
- BBC,2012,*Timeline: The unfolding Eurozone crisis* ,BBC NEWS,[online],diakses tanggal 20 oktober 2013, tersedia di:<http://www.bbc.com/news/business-13856580>
- BBC,2011, *Greece says debt talks to avert default 'productive'*,BBC NEWS,[online] diakses tanggal 1 November 2013 tersedia di:<http://www.bbc.co.uk/news/business-14969034>
- BBC,2009,*Greece insists it will not default on huge debts*,BBC NEWS,[online],diakses tanggal 20 oktober 2013, tersedia di:<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8407605.stm>
- Castle, S.,2012,*With Details Settled, a 2nd Greek Bailout Is Formally Approved*,The New York Times,[online] diakses 13 oktober 2013, tersedia dalam: www.nytimes.com
- Elliott, L.,Inman, P.& Smith H.,2013,*IMF admits: we failed to realise the damage austerity would do to Greece*,The Guardian News [online] diakses 15 oktober 2013, tersedia dalam:<http://www.theguardian.com>
- Pangalos, P., 2009,*Greece vows to 'clean up' its debt mountain*,The Times,[online] diakses 8 oktober 2014, tersedia di:<http://www.thetimes.co.uk/tto/business/economics/article2151423.ece>

- Suara pers,2010,*Jerman Panggil IMF bantu Yunani*,[online] diakses tanggal 17 oktober 2014, tersedia dalam:
<http://www.dw.de/jerman-panggil-imf-bantu-yunani/a-5402502>
- Telegraph staff and agencies,2011,*George Papandreu resigns as Greece's prime minister*,The Telegraph,[online] diakses tanggal 5 November 2013, tersedia di:<http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8879647/George-Papandreu-resigns-as-Greeces-prime-minister.html>
- Tempo,2012,*Uni Eropa Setujui Bailout Kedua Yunani*, Tempo Bisnis, [online] diakses tanggal 1 Novermber 2013 tersedia di:
www.tempo.co/read/news/2012/02/21/090385346/Uni-Eropa-Setujui-Bailout-Kedua-Yunani
- Tomlinson, R.& Rastello, S.,2011,*Strauss-Kahn Bailouts Give IMF Chief Popularity Over Sarkozy*, Bloomberg,[online] diakses tanggal 20 november 2014, tersedia dalam:
<http://www.bloomberg.com/news/2011-01-26/strauss-kahn-bailing-out-Euro-gives-imf-s-chief-popularity-sarkozy-misses.html>